BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP, namun dalam perkembangannya, pemahaman tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990. Selain dalam Putusan Mahkamah Agung, saksi mahkota juga dikenal penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana serta pada Pasal 10A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2011 Tentang *Justice Collaborator*. Seperti halnya dalam tersangka atau terdakwa yang menjadi saksi mahkota atas tindak pidana yang dilakukan secara sama-sama. Maka dari itu kesaksian atau keterangan dari terdakwa atau tersangka ini harus sejalan dengan Pasal 142 KUHP dimana berkas perkaranya wajib untuk dipisah (splitsing) agar nantinya para terdakwa atau tersangka disidangkannya juga secara terpisah.
2. Kedudukan saksi mahkota dalam perkara pidana Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, yang mengadili perkara pembunuhan berencana atas nama terdakwa Ferdy Sambo kesaksiannya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi dan merupakan saksi kunci

yang dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas, karena minimnya alat bukti saksi yang melihat, mengalami, dan mendengar sendiri. Dalam kasus tersebut penggunaan saksi mahkota telah sesuai dengan syarat-syarat penggunaan saksi mahkota mulai dari terjadinya tindak pidana penyertaan, minimnya alat bukti dan dilakukannya pemisahan berkas perkara. Pada dasarnya kedudukan dari saksi mahkota ini adalah sebagai bagian dari adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang didalam tahap pembuktian perkara pidana.

B. Saran

1. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam membentuk peraturan harus memperkuat terkait dengan aturan dan dasar hukum tentang saksi mahkota ini pada proses persidangan. Selain itu bersangkutan dengan kepastian serta perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi mahkota, karena pada dasarnya penggunaan saksi mahkota sangatlah berguna dalam mengungkap fakta hukum di persidangan. Dengan ditetapkannya aturan hukum bagi saksi mahkota maka tidak akan ada lagi permasalahan dan kesalahpahaman diantara penegak hukum dengan pandangan yang menentang keberadaan saksi mahkota ini.
2. Saksi mahkota mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengungkap kasus pidana yang minim alat bukti terutama dalam kasus penyertaan, hendaknya pemerintah merevisi KUHAP dan mengatur tentang saksi mahkota sebagai alat bukti di dalam KUHAP karena penggunaan saksi mahkota sangatlah berguna dalam mengungkap fakta hukum di persidangan.